BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gagasan pengaturan pencemaran asap batas di Kawasan ASEAN telah diawali jauh sebelum AATHP disepakati, pertemuan-pertemuan regional yang dilakukan negara-negara ASEAN meruakan respon atas dampak kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam beberapa dekade telah memicu dampak pencemaran asap yang sampai melintasi lintas batas negara dan diklaim mencemari negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya kesepakatan ASEAN berkaitan dengan pencemaran asap lintas batas. Barulah pada tahun 2002 negara-negara ASEAN menyepakati terbentuknya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002* yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara ASEAN secara bertahap sebagai wujud komitmen negara-negara ASEAN guna bekerjasama menangani serta mencegah pencemaran asap lintas batas.
2. *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002* tidak memiliki kepastian hukum mengingat instrument hukum ini merupakan instrument hukum internasional khususnya bersifat *softlaw* yang tidak memiliki daya ikat memaksa bagi negara-negara khususnya di Kawasan ASEAN untuk tunduk dan mematuhi. Menurut teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang salah satunya adalah kepastian hukum, menurutnya indikator

kepastian hukum terdapatnya jaminan hukum tersebut dapat diterapkan. Instrument hukum internasional yang sangat bergantung kepada moralitas nasional untuk tunduk serta mengikatkan diri tidak serta merta dapat diterapkan secara menyeluruh bergantung kepada kepentingan nasional masing-masing negara. Di samping itu hukum nasional yang mengatur yurisdiksi ekstrateritorial di bidang pencemaran asap lintas batas sebagaimana digagas Singapura melalui *Transboundary Haze Pollution Act 2014* juga tidak memberi kepastian hukum mengingat ketentuan seperti itu tidak dapat diterapkan serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara serta prinsip *noninterference* yang menjadi ruh dari Piagam ASEAN. Ketentuan seperti itu justru akan memperluas permasalahan ini yang tidak hanya persoalan asap lintas batas namun justru akan memperburuk hubungan diplomatik antar negara mengingat penerapan aturan yang bersifat yurisdiksi extraterritorial akan bertentangan dengan kedaulatan negara lain.

3. Konstruksi yurisdiksi penegakan hukum pencemaran asap lintas batas yang ideal adalah dengan menggunakan yurisdiksi hukum nasional yang sejalan dan seiras dengan tujuan masyarakat dan negara tempat dimana hukum nasional itu hidup dan berkembang, mengingat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidaklah universal, justru ditentukan oleh nilai sosial masyarakatnya sendiri dan faktor non hukum lainnya. Sehingga pengaturan hukum khususnya pengaturan penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas dapat berkepastian hukum dan memenuhi tujuan hukum. Atas

dasar pertimbangan filosofis tujuan kemerdekaan maka Indonesia perlu turut serta mewujudkan ketertiban dunia dengan membentuk ketentuan hukum Undang-Undang Pencemaran Asap Lintas Batas secara khusus sebagai respon Indonesia terkait komitmen Bersama ASEAN dengan memperhatikan pertimbangan filosofis kemerdekaan (kedaulatan) negara sebagai tonggak utama, baik dalam penerapan hukum termasuk dalam yurisdiksi hukumnya yang tidak bersifat ekstraterritorial demi menghormati kemerdekaan (kedaulatan) negara lain dan berhubungan dengan sanksi perlu mengutamakan penerapan sanksi administrasi sebagai pilihan utama (*Pemium Remedium*) yang dimuat secara tegas sebagai bentuk konkret pengutamaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas.

B. Saran

1. Menindaklanjuti ratifikasi AATHP, Indonesia sebaiknya segera membahas pembentukan undang-undang pencemaran asap. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen Indonesia untuk serius menangani dan mencegah pencemaran asap lintas batas beserta sumbernya. Indonesia perlu untuk menunjukkan dan melaksanakan komitmen ini mengingat Indonesia yang rentan akan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber penyebab pencemaran asap lintas batas. Perlu untuk diperhatikan dalam perumusan undang-undang ini pencapaian tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara komprehensif. Di samping itu penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini memperhatikan pertimbangan

filosofis kemerdekaan (kedaulatan) negara, sehingga tidak bersifat ekstraterritorial dan menghormati kedaulatan negara lain.

2. Hendaknya negara-negara ASEAN tidak menjadikan permasalahan pencemaran asap lintas batas hanya sebagai permasalahan dan tanggung jawab Indonesia saja. Lingkungan merupakan suatu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lain, baik dalam aspek ruang darat laut dan udara maupun dalam aspek territorial yurisdiksi yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu kerusakan yang terjadi di satu wilayah akan mempengaruhi kondisi lingkungan di tempat lain, begitu pula sebaliknya. Sehingga tanggung jawab lingkungan merupakan tanggung jawab bersama insan bumi tanpa memandang nasionalitas, territorial dan identitas. Menjaga dan merawat bumi merupakan tanggung jawab umat manusia secara individu maupun berkomunal, mengingat manusia merupakan subjek yang paling memiliki kemampuan untuk menjaga lingkungan termasuk pula sebagai sumber kerusakan.
3. Untuk memperkuat kedaulatan hukum nasional dalam pengaturan perjanjian internasional di masa depan, Indonesia sebaiknya menganut konsep monisme dengan primat hukum nasional. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif mengintegrasikan perjanjian internasional ke dalam kerangka hukum nasional, menjaga konsistensi hukum dalam negeri, dan menghindari konflik antara hukum internasional dan hukum nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan

kedaulatan hukum nasionalnya sambil tetap memenuhi komitmen internasionalnya, menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, dan memfasilitasi pelaksanaan perjanjian internasional secara efisien dan efektif di dalam negeri. Selain itu, hal ini juga akan memberikan panduan yang jelas bagi pengadilan nasional dalam menangani sengketa yang melibatkan hukum internasional, menjaga integritas sistem hukum Indonesia, dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam perlindungan hukum dan hak mereka.